



KOMUNIKASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL SUMATERA BARAT DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)

Adri Yanto*, Universitas Andalas, Indonesia

Emeraldy Chatra, Universitas Andalas, Indonesia

Ernita Arif, Universitas Andalas, Indonesia

ABSTRACT

This research examines the problem of narcotics which has become a global issue and a concern and has become an agenda in many countries and the international community. One of the attentions given by BNN is through the Community-Based Intervention Program (IBM). The Community-Based Intervention Program (IBM) is a rehabilitation for drug abusers designed from the community, for the community and by the community through recovery agents (AP) by utilizing community facilities and potential in accordance with local wisdom. This study aims to analyze the West Sumatra BNNP communication process and analyze BNNP communication barriers in running the IBM Program. The method used in this study is a qualitative method with in-depth interview techniques, observation and documentation. The results of this research are that the West Sumatra BNNP has a persuasive communication process, Lapau as a place to transfer information, Recovery Agents in embracing drug abusers and BNNP in collaboration with various stakeholders.

ARTICLE HISTORY

Received 11/05/2023
Revised 01/06/2023
Accepted 08/06/2023
Published 05/09/2023

KEYWORDS

BNNP; IBM; Community-Based Intervention Program; rehabilitation; drugs.

CITATION (APA 6th Edition)

Yanto, A., Chatra, E., & Arif, E. (2023). Komunikasi Badan Narkotika Nasional Sumatera Barat dalam Implementasi Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), 400-412.

*CORRESPONDENCE AUTHOR

✉ adriyanto2017@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.30743/mkd.v7i2.7154>

PENDAHULUAN

Permasalahan penyalahgunaan narkoba kian hari kian mengkhawatirkan. Selain dengan semakin bertambahnya jumlah penyalahgunaan jenis dan bentuk narkoba yang beredar pun bertambah banyak (RI, 2021). Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 narkoba memiliki definisi sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun non sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan Sementara menurut WHO narkoba adalah semua zat kecuali makanan, air atau oksigen yang jika dimasukkan ke tubuh dapat mengubah fungsi tubuh secara fisik dan psikologis.

Narkoba bukanlah sebuah hal baru di Indonesia. Sebelum PD ke II, yakni pada masa kolonial Belanda, narkoba sudah mulai beredar. Bahkan pada tahun 1970-an, narkoba sudah menjadi masalah nasional (Kusmaryani, 2009). Di Indonesia, perkembangan narkoba jenis baru terus bermunculan, yang dikemas dalam berbagai bentuk seperti makanan ringan, suplemen, obat kecantikan dan lain-lain, yang membuatnya semakin sulit diidentifikasi. Berdasarkan hasil survei Nasional BNN dan Puslitkes UI tentang penyalahgunaan narkoba di 34 provinsi, diketahui bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia tahun 2018 sebesar 1,77% atau 3.376.115 orang (usia 10-59 tahun).

Kebijakan nasional dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam pasal 4 memuat Pertama, menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan IPTEK. Kedua, mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika. Ketiga, memberantas peredaran gelap narkotika dan



prekursor narkotika. Keempat, menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan narkotika.

Menurut data *National Drug Prevention Centre* tahun 2019, kematian akibat narkoba di Asia saja mencapai 11.071 orang per tahun atau 30 orang per hari. Laporan UNODC setiap tahunnya menunjukkan bahwa estimasi produksi opium, kokain dan *methamphetamine* terus meningkat (RI, 2021). Peliknya permasalahan seputar penyalahgunaan dan peredaran narkoba ini membuat pemerintah dan instansi terkait mengajak peran serta masyarakat untuk ikut berpartisipasi mencegah dan mengatasi berkembangnya perilaku penyalahgunaan narkoba. Hal ini juga tertuang dalam UU 35 tahun 2009 tentang narkotika, Pasal 104 yang menerangkan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas luasnya untuk berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Pasal 105 menerangkan bahwa masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Pasal 106 menerangkan Hak masyarakat diwujudkan dalam bentuk: mencari, memperoleh dan memberikan informasi, memperoleh pelayanan, menyampaikan saran dan pendapat, memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya, memperoleh perlindungan hukum. Dan Pasal 107 menyatakan Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (RI, 2021)

BNN sebagai organisasi yang fokus pada penanggulangan narkoba tentu tidak lepas dari tujuan organisasi, adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh seluruh anggota organisasi. Secara formal tujuan organisasi adalah arah atau sasaran yang ingin dicapai melalui prosedur, program, pola (*network*), kebijakan (*policy*), strategi, anggaran (*budgeting*) dan peraturan yang telah ditetapkan lewat program IBM (Sari, 2006).

Atas dasar itu pula, BNN sebagai lembaga terdepan dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia, melakukan berbagai langkah-langkah tegas dan konkret, termasuk dengan mengajak partisipasi dan peran aktif dari masyarakat. Salah satunya ialah melalui program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). Program ini merupakan salah satu pendekatan rehabilitasi dalam bentuk minimal dan ambang batas rendah (*Low Threshold*), yang berarti layanan mudah diakses serta tidak membutuhkan banyak persyaratan untuk terlibat di dalamnya. Sebagaimana diketahui, masalah penyalahgunaan narkoba tidak hanya menyerang kota-kota besar tetapi juga merambah hingga ke pelosok daerah. Di sisi lain, ketersediaan dan daya tampung lembaga rehabilitasi yang dikelola pemerintah maupun swasta sangat terbatas. Salah satu solusi yang dapat diimplementasikan ialah dengan mendorong masyarakat turut berpartisipasi melakukan pemulihan penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan hal tersebut, salah satu respons BNN dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan narkoba adalah dengan meluncurkan program IBM dengan harapan program tersebut dapat meningkatkan partisipasi langsung masyarakat untuk mengatasi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayahnya secara mandiri. Program ini dilaksanakan pada wilayah setingkat kelurahan atau desa, berdasarkan kriteria tertentu, dan menunjang pelaksanaan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang diselenggarakan secara masif (BNN, 2021a)

Program IBM dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi layanan yang sangat memungkinkan untuk diterapkan di berbagai tatanan masyarakat. Kegiatan-kegiatan dalam program ini secara garis besar meliputi penjangkauan, deteksi dini, edukasi dan pendampingan, serta rujukan sesuai tingkat kebutuhan penyalahgunaan narkoba. Terdapat beberapa dari kegiatan IBM yaitu penyalahgunaan narkoba, Agen Pemulihan (AP), keluarga yang bermasalah dengan gangguan

penyalahgunaan narkoba pada salah satu atau lebih anggotanya, dan masyarakat yang peduli dan perangkat pemerintah lokal.

Dengan berjalannya program IBM diharapkan dapat menjadi intervensi dini di tingkat masyarakat serta dapat membuka lebar akses masyarakat itu sendiri terhadap layanan rehabilitasi di mana sebelumnya terdapat kesulitan dalam hal lokasi dan biaya untuk datang ke tempat rehabilitasi. Program ini mengharuskan adanya interaksi langsung dengan pengguna narkoba, keluarga dan masyarakat sekitar (BNN, [2021a](#)). Penyelenggaraan Program IBM ini pula lah yang kemudian dilaksanakan oleh BNN Provinsi Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang. Sebagai *pilot project*, maka BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) menunjuk Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan, sebagai lokasi pelaksanaannya. Program ini dilakukan selama 1 tahun, dimulai sejak Januari 2021 dan berakhir pada Desember 2021.

Kegiatan komunikasi yang dilakukan BNNP dalam penyelenggaraan program ini terjadi dengan berbagai elemen dan komponen masyarakat di Kelurahan Rawang. Proses komunikasi berlangsung dari semenjak tahap awal sosialisasi program hingga tahap akhir suksesnya terlaksana program tersebut. Berbagai aktivitas komunikasi yang terjadi merupakan serangkaian kegiatan komunikasi dan di dalamnya terdapat proses-proses komunikasi dan harus dikelola dengan sebaiknya supaya komunikasi efektif dapat terwujud yang dalam hal ini menyukkseskan berjalannya program IBM. Proses komunikasi dapat dilihat sebagai transfer informasi atau pesan-pesan (*messages*) dari pengirim pesan sebagai komunikator, kepada penerima pesan sebagai komunikan melalui cara dan saluran tertentu. Tujuan untuk agar ada perubahan perilaku sesuai pesan yang diterima. Berdasarkan uraian tersebut, maka hakikatnya komunikasi ialah hasil dari proses yang rumit meliputi kognisi (*thinking*) dan perilaku (*doing*). Terdapat tiga tahap yang dilakukan dalam proses komunikasi, yaitu seseorang harus memprakarsai komunikasi, komunikasi harus diteruskan/dikirim dari sumber menuju tujuannya, komunikasi harus membuat dampak terhadap penerima (*recipient*) (Silalahi, [2004](#)).

Apabila ditinjau dari perspektif sosiologi komunikasi, pelaksanaan program ini akan menimbulkan interaksi langsung antara lembaga BNN dengan individu-individu yang tergabung dalam masyarakat. Tentunya akan berdampak pada pola hidup dan lingkungan tempat pelaksanaan program. Keterlibatan BNN dengan semua pihak, dari terlaksananya sosialisasi hingga hilir program, membuat masyarakat dapat memahami tindakan-tindakan preventif dalam menjaga lingkungan sosial mereka dari dampak negatif penyalahgunaan narkoba. Di sisi lain, apabila ditinjau dari perspektif psikologi komunikasi, pelaksanaan program IBM juga membuat pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh BNN mengenai permasalahan narkoba akan tersampaikan dengan lebih efektif. Hal ini dikarenakan setiap pesan tersebut melibatkan para anggota masyarakat yang secara psikologis sangat mengenal lingkungan dan latar belakang penyalahguna, sehingga meminimalisir kesalahan persepsi dan hambatan-hambatan dalam berkomunikasi lainnya.

Sebagaimana diungkapkan oleh Bovee dan Thill, komunikasi dianggap efektif hanya jika pada proses komunikasi yang dilakukan, komunikan memahami pesan dengan benar dan memberikan respons sesuai dengan apa yang diinginkan oleh komunikator (Boove, [2007](#)). Komunikasi tidak selalu berjalan lancar dalam setiap prosesnya. Hal ini disebabkan karena adanya hambatan, kendala atau gangguan yang terjadi selama proses komunikasi berlangsung. Menurut R. Kreitner, terdapat empat macam hambatan yang dapat mengganggu dalam sistem komunikasi, yaitu: hambatan dalam proses, hambatan secara fisik, hambatan semantik, hambatan psikososial (Suryanto, [2015](#)).

Komunikasi merupakan hal yang pasti dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya, demikian juga dengan hewan. Komunikasi merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dalam menjalani kehidupannya. Bahkan seorang bayi pun sudah dapat melakukan komunikasi, seperti ketika ia

menangis itu bisa jadi menandakan bahwa ia sedang lapar atau tidak nyaman. Maka jelaslah bahwa komunikasi adalah hal penting yang harus dipelajari dan dipahami.

Salah satu teori komunikasi klasik yang sangat mempengaruhi teori-teori komunikasi selanjutnya adalah teori informasi atau teori matematis. Teori ini merupakan bentuk penjabaran dari karya Claude Shannon dan Warren Weaver *The Mathematical Theory of Communication* ini melihat komunikasi sebagai fenomena mekanistik, matematis, dan informatif: komunikasi sebagai transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan saluran dan media komunikasi. Ini merupakan salah satu contoh gamblang dari mazhab proses yang mana melihat kode sebagai sarana untuk mengonstruksi pesan dan menerjemahkannya (*encoding* dan *decoding*). Titik perhatiannya terletak pada akurasi dan efisiensi proses (Mulyana, [2008](#)).

Proses yang dimaksud adalah komunikasi seorang pribadi yang bagaimana ia mempengaruhi tingkah laku atau *state of mind* pribadi yang lain. Jika efek yang ditimbulkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka mazhab ini cenderung berbicara tentang kegagalan komunikasi. Ia melihat ke tahap-tahap dalam komunikasi tersebut untuk mengetahui di mana letak kegagalannya. Selain itu, mazhab proses juga cenderung mempergunakan ilmu-ilmu sosial, terutama psikologi dan sosiologi, dan cenderung memusatkan dirinya pada tindakan karya Shannon dan Weaver ini kemudian banyak berkembang setelah Perang Dunia II di Bell Telephone Laboratories di Amerika Serikat mengingat Shannon sendiri adalah insinyur di sana yang berkepentingan atas penyampaian pesan yang cermat melalui telepon. Kemudian Weaver mengembangkan konsep Shannon ini untuk diterapkan pada semua bentuk komunikasi. Titik kajian utamanya adalah bagaimana menentukan cara di mana saluran (*channel*) komunikasi digunakan secara sangat efisien. Menurut mereka, saluran utama dalam komunikasi yang dimaksud adalah kabel telepon dan gelombang. Latar belakang keahlian teknik dan matematik Shannon dan Weaver ini tampak dalam penekanan mereka. Misalnya, dalam suatu sistem telepon, faktor yang terpenting dalam keberhasilan komunikasi adalah bukan pada pesan atau makna yang disampaikan- seperti pada mazhab semiotika, tetapi lebih pada berapa jumlah sinyal yang diterima dalam proses transmisi.

Oleh sebab itu untuk suksesnya program IBM di Kelurahan Rawang, BNNP sebagai inisiator dan pengawas pelaksanaan membutuhkan dukungan dan peran serta antara pemerintah dan masyarakatnya. Dalam hal ini dibutuhkan penguatan pemahaman yang sama agar mempunyai kesamaan tujuan dalam komunikasi yang dilakukan. Di sinilah letak pentingnya komunikasi sebagai jembatan untuk mencapai kesepakatan dan pemahaman yang sama antara pemerintah dan masyarakatnya. Penelitian ini menyorot bagaimana Komunikasi BNNP Sumatera Barat Dalam Implementasi Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Kota Padang Kelurahan Rawang.

METODE

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dari pemahaman berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia dengan menggambarkan secara kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Iskandar, [2009](#)). Pada penelitian ini, peneliti dapat menentukan sendiri jenis data yang diinginkan baik itu melalui pengamatan, dokumentasi, foto, gambar, wawancara terhadap sumber-sumber yang dipercaya (informan), sehingga fenomena-fenomena yang diamati dapat digambarkan lebih utuh, lengkap dan sebagai mana adanya. Penekanan utama pada penelitian ini adalah menangkap bagaimana proses komunikasi BNNP Sumatera Barat dalam mengkomunikasikan implementasi program IBM di Kelurahan Rawang, dan menganalisis hambatan-hambatan yang terjadi.

Metode yang digunakan adalah metode studi kasus deskriptif. Studi kasus adalah metode penelitian yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian dengan menggunakan cara yang

sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasil. Tujuan dari metode penelitian studi kasus adalah untuk mengumpulkan informasi secara komprehensif, sistematis dan mendalam tentang suatu kasus (Patton, [2002](#)). Secara ringkas yang membedakan metode studi kasus dengan metode penelitian lainnya adalah kedalaman analisisnya pada kasus yang lebih spesifik.

Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif, merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Menurut Whitney, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat (Nazir, [1988](#)). Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, menguji hipotesis atau membuat prediksi. Penelitian deskriptif bersifat menjelaskan, menggambarkan atau menuturkan dan menafsirkan data objek penelitian. Seorang peneliti tidak melakukan wawancara berdasarkan sejumlah pertanyaan yang telah disusun dengan mendetail dengan alternatif jawaban yang telah dibuat sebelum melakukan wawancara. Berdasarkan pertanyaan yang ada, peneliti dapat mengembangkan pertanyaan ketika melakukan wawancara atau wawancara di kemudian hari (Afrizal, [2017](#)). Peneliti melakukan wawancara kepada informan di lingkungan BNNP Sumatera Barat, observasi dan proses dokumentasi.

HASIL

Proses Komunikasi BNNP Sumatera Barat

Permasalahan narkoba telah menjadi isu global serta perhatian dan menjadi agenda di banyak negara serta komunitas internasional. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan narkoba telah menjadi kegiatan yang sifatnya transaksional dan membahayakan, di mana peredarannya melibatkan jaringan lintas negara serta dapat berdampak terhadap negara lainnya. Cakupan pengaruh peredaran gelap narkoba yang merupakan kejahatan melewati lapisan sosial ekonomi masyarakat di mana pun berada, sehingga tepat bila dikatakan bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan bentuk *globalization organized crime* (BNN, [2022](#)).

Sebagai salah satu strategi menuju Indonesia Bersinar yang ingin dicapai oleh Badan Narkoba Nasional adalah dengan menjadikan kelurahan/desa sebagai garda terdepan dalam menjadikan Indonesia yang bersih dari narkoba dan mempunyai daya tangkal terhadap penyalahgunaan narkoba dengan bersinergi dengan Pemerintah Daerah. Kemudian melalui Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkoba Nasional salah satu strategi dalam upaya penanganan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba adalah dengan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di wilayahnya sesuai dengan kondisi lingkungan masyarakat. Pada umumnya kondisi yang ditemukan di tingkat pedesaan tidak memiliki masalah dengan penyalahgunaannya atau dalam kategori rendah sehingga tidak membutuhkan layanan rehabilitasi residensial jangka panjang. Sehingga dibutuhkan layanan informal dalam bentuk perawatan diri serta perawatan komunitas merupakan jenis layanan yang tidak membutuhkan biaya besar dan dapat diberikan kepada penyalahguna kategori coba pakai dan teratur pakai yang angka prevalensinya paling besar.

Pengguna narkoba kategori ringan dapat mengikuti pelayanan di luar residensial yang dilaksanakan dalam bentuk rawat jalan. Pengguna narkoba kategori ini mendapatkan layanan rehabilitasi sesuai dengan rencana intervensi yang terkait dengan pemulihannya dari masalah penyalahgunaan narkoba. Pelayanan di luar residensial membuka kesempatan kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam memberikan pelayanan kepada pengguna narkoba dalam program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) (BNN, [2021b](#)).

Intervensi Berbasis Masyarakat merupakan kepedulian pemerintah dalam penanganan penyalahgunaan narkoba di masyarakat dengan cara menghadirkan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di masyarakat, mengingat ketersediaan dan aksesibilitas layanan yang masih terbatas jumlahnya. Program ini dilakukan dengan pendekatan dalam bentuk sederhana dengan ambang batas rendah (*low threshold*) yang berarti layanan tersebut mudah diakses dan tidak membutuhkan persyaratan yang sulit untuk terlibat di dalamnya.

Apa itu IBM? Merupakan rehabilitasi penyalahguna narkoba yang dirancang dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat melalui agen pemulihan (AP) dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal. Dengan pendekatan rehabilitasi dengan ambang batas rendah, layanan mudah diakses dan tidak membutuhkan persyaratan untuk terlibat di dalamnya. Penelitian Komunikasi BNNP Sumatera Barat dalam Implementasi Program IBM di Kelurahan Rawang dengan melakukan observasi di sekitar wilayah Kelurahan Rawang, menemukan dokumentasi program IBM di internet sebagai penunjang data dan wawancara mendalam kepada pelaksana kegiatan IBM yang juga sekaligus selaku internal BNNP Sumbar. Maka dari itu hasil penelitian ini menampilkan gambaran proses komunikasi BNNP Sumatera Barat dalam Implementasi Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Kelurahan Rawang dan analisa hambatan komunikasi yang terjadi dalam Implementasi Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Kelurahan Rawang sebagai berikut.

Komunikasi BNNP Sumatera Barat dalam Implementasi Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Kelurahan Rawang

Dalam proses komunikasi yang terjadi di BNNP Sumatera Barat, peneliti menemukan proses komunikasi persuasif, *Lapau* sebagai tempat transfer informasi, Agen Pemulihan dalam merangkul penyalahguna narkoba dan BNNP menjalin kolaborasi dengan beragam *stakeholders*. Berikut peneliti tampilkan temuan-temuan penelitian.

Komunikasi BNNP dengan Pemerintah Kelurahan tentang Program IBM

BNNP Sumbar melaksanakan komunikasi persuasif kepada pemerintah setempat di Rawang, yakni dengan Bapak Lurah Rawang untuk dapat menjalankan program IBM. Informan JM mengungkapkan dirinya sebagai kepala bidang menjemput bola untuk berkomunikasi, dengan meminta bergabung dengan masyarakat apabila ada rapat di Kelurahan. Proses komunikasi awal dibangun, dengan mengikuti kegiatan-kegiatan kelurahan sebelum menyampaikan niat untuk bekerja sama melaksanakan program IBM. Setelah ikut beberapa kali pertemuan, informan JM menjelaskan bahwa ada program BNN melewati BNNP Sumbar untuk melaksanakan IBM di kelurahan Rawang karena banyaknya jumlah pengguna narkoba di Rawang. Pada mulanya staf BNNP yang selalu berkunjung ke kelurahan agar mau menerima tawaran kerjasama menjalankan program IBM.

Komunikasi yang dijalin dengan kelurahan kemudian dapat diterima dengan baik oleh Pak Lurah dan memberikan kesempatan kepada BNNP Sumbar untuk sosialisasi program IBM kepada tamu undangan rapat yang hadir rapat di kelurahan. Dari pertemuan yang dilakukan kelurahan, kemudian bagi masyarakat yang tertarik dengan program IBM di undang ke kantor untuk mendengar paparan apa dan bagaimana program IBM berjalan pada tahun 2020. Informan JM yang terlibat aktif dalam program IBM sedari awal, melakukan komunikasi persuasif kepada masyarakat, sampai terpilih lima orang AP yang berasal dari tokoh-tokoh yang bisa berkomunikasi baik dengan masyarakat Rawang.

Dari tahapan komunikasi yang dilakukan oleh BNNP Sumbar, komunikasi persuasif yang pertama digunakan, mengingat program IBM ini tidak bisa dilakukan mandiri oleh BNNP Sumbar. Melainkan perlu mengikutsertakan kelurahan Rawang karena basisnya dari masyarakat. Ini dilakukan

karena kebutuhan komunikasi yang lebih mudah dan punya kuasa mengajak masyarakat adalah kelurahan, Lurah yang bisa memilih masyarakat yang akan dijadikan agen-agen pemulihan.

Perjalanan berikutnya setelah dapat lima nama tokoh-tokoh yang direkomendasikan oleh Pak Lurah, dilanjutkan dengan adanya SK dari lurah kepada lima orang Agen Pemilihan terpilih untuk melakukan program IBM. Gaya komunikasi persuasif digunakan oleh pegawai BNNP meraih pemerintah setempat yakni Lurah untuk mau membuka jalan dan menjalankan program bersama masyarakat untuk pencegahan narkoba di Rawang. Komunikasi persuasif ini dilakukan beberapa tahap sampai AP memahami tugasnya sesuai dengan tujuan akhir dari program yakni melakukan komunikasi dengan para penyalahguna di kelurahan Rawang untuk mau ikut rehabilitasi. Informan JM selaku Kepala Bidang Rehabilitasi BNNP Sumbar membuka komunikasi dengan pemerintah.

“Menjemput bola pengguna narkoba ringan. Dengan melibatkan masyarakat untuk merehabilitasi secara singkat penyalahguna ringan.” (Wawancara dengan informan JM, Mei 2023)

Lapau sebagai Tempat Transfer Informasi Program IBM kepada Masyarakat

Kepala Bidang Rehabilitasi BNNP Sumbar melakukan komunikasi dengan warga yang dilakukan dari *lapau* ke *lapau* (sebuah warung tempat memesan kopi atau minuman lainnya dalam bahas Minang), agar masyarakat memahami program IBM. Agar pesan-pesan yang disampaikan oleh BNNP Sumbar lebih mudah diterima, BNNP Sumbar berkomunikasi dengan jajaran pemerintahan setingkat Lurah dengan tujuan Pak Lurah dapat memberikan informasi secara luas kepada warga, namun hal itu belum optimal. Kabid Rehabilitasi BNNP Sumbar kemudian melihat sosialisasi program IBM masih belum tersampaikan oleh publik oleh Lurah. Keadaan demikian membuat informan JM, melakukan inisiasi untuk memulai sosialisasi tentang program IBM di *lapau*, merupakan ruang publik yang banyak digunakan untuk berkomunikasi. Sebutan *lapau* merupakan Bahasa Minang untuk tempat *ngopi* (aktivitas minum kopi).

Waktu sosialisasi di *lapau* pun dilakukan informan BNNP Sumbar juga tidak menentu, kadang malam, pagi dan siang. Artinya ada ruang waktu yang tidak menentu untuk melakukan transfer informasi tentang program-program IBM. Informan mengemukakan bahwa proses transfer pesan kepada masyarakat di *lapau* lebih mudah, meskipun informan punya modal (dengan membawa rokok) untuk berbagi kepada orang di *lapau*. Meskipun level kabid di BNN, informan JM mau ikut bergabung bercerita kepada masyarakat dalam melakukan pendekatan dengan masyarakat dengan tempat di *lapau-lapau* di Rawang.

Pesan yang disampaikan tentang pentingnya program IBM lebih mudah diterima, dibandingkan dengan sosialisasi formal di ruang rapat. Di *lapau* tersebut juga ikut perangkat Lurah Rawang, Babinsa, dan masyarakat yang suka *ngopi* di *lapau*. *Lapau* sebagai wadah berinteraksi, membuka informasi tentang pelaksanaan IBM dengan tujuan pelaksana IBM berkomunikasi dengan penyalahguna narkoba, keluarga dan masyarakat sekitar. Sehingga penggunaan angka pengguna narkoba dapat ditekan perlahan dari masyarakat untuk masyarakat.

Komunikasi yang digunakan oleh BNNP Sumbar ini berada di luar jam kerja dengan meluangkan waktu informan dalam rangka memberikan pelayanan terdepan bagi penyalahguna narkoba di tengah masyarakat. Budaya masyarakat *palapau* di Minangkabau, memanfaatkan *lapau* oleh informan karena melihat peluang informasi mudah diterima. Sehingga ada penekanan yang signifikan terhadap angka penyalahgunaan narkoba di wilayah Rawang. Hal demikian dilakukan oleh pelaksana BNNP Sumbar agar program IBM berjalan sesuai tujuannya, yakni adanya kesadaran penyalahguna untuk wajib lapor lewat keluarga yang telah mendengar informasi dari *lapau*.

Membentuk Agen Pemulihan (AP) Merangkul Pemakai Narkotika

Aksi pencegahan terus dilakukan oleh BNNP Sumbar lewat program IBM. Agen Pemulihan yang biasa disebut AP merupakan perpanjangan tangan informasi dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika. Konsep AP ini merupakan kelompok kerja yang melalui proses BIMTEK (Bimbingan Teknis) dengan memasukkan materi rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika ringan. Pelaksananya adalah masyarakat untuk masyarakat itu sendiri, dibentuk lima orang untuk Kelurahan Rawang.

AP ditunjuk secara langsung oleh Lurah, sesuai permintaan BNNP Sumbar dalam menjalankan program IBM, kemudian mendapatkan BIMTEK selama 3 hari atau paling lama seminggu dengan regulasi yang BNN. JM mengatakan bahwa AP berfungsi untuk mengajak para penyalahguna narkoba untuk mau berobat, yakni melakukan rehabilitasi dengan mitra BNN yang ada di Sumatera Barat,

Kegiatan IBM dilakukan oleh Agen Pemulihan (AP) yang merupakan warga masyarakat yang tinggal di desa/kelurahan yang terpilih sebagai mitra kerja BNN. Melalui AP, IBM memantau dan mendampingi penyalahguna narkoba tingkat ringan atau yang memerlukan bina lanjut melalui kegiatan dan layanan IBM. Oleh karena itu, program yang dijalankan IBM mempunyai keragaman program rehabilitasi sesuai dengan masalah narkoba dan potensi yang dimiliki masyarakat di wilayah, seperti Rawang yang sudah berstatus bahaya menjadi salah satu wilayah yang perlu diintervensi berbasis masyarakat.

Terkait dengan IBM tersebut, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dapat membantu memfasilitasi dalam hal pelaksanaan program IBM di Desa. Namun dalam pelaksanaan nantinya dibutuhkan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota tentang Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa agar Desa dapat melaksanakan program IBM. Jika nantinya telah diterbitkan peraturan terkait pelaksanaan IBM di Desa, Pemerintah Desa dapat menyediakan tempat rehabilitasi yang berupa tempat khusus yang disediakan untuk rehabilitasi atau kontribusi lainnya dari masyarakat Desa. Untuk melaksanakan IBM, Kepala Desa/Pemerintah Desa dapat mengajukan calon-calon Agen Pemulihan yang berasal dari unsur masyarakat yang dinilai mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Agen Pemulihan.

Sesuai standar yang diberikan BNN bahwa ada Lima orang AP yang mendapatkan SK dari Bapak Lurah Rawang, yakni menjalankan program IBM. AP berasal dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda, dinilai yang paling dekat dengan masyarakat. Bagi pengguna narkoba berat, petugas AP ditugaskan untuk mengajak ke BNN dalam rangka mendapatkan rehabilitasi dengan pengobatan lebih lanjut. AP melakukan pendekatan dengan cara kekeluargaan yang lebih humanis kepada pemakai narkoba untuk bisa berhenti dan rehab. Target AP yakni bisa merayu penyalahguna narkoba untuk mau mengikuti program IBM di Rawang.

Program ini hanya berjalan boleh satu tahun atau dua tahun, habis itu BNN meninggalkan program tersebut dan BNNP Sumbar berharap masyarakat atau Lurah melanjutkan program. BNN tidak mendukung anggaran secara maksimal dengan banyaknya desa/kelurahan di Indonesia. Maka dari itu ada upaya AP sebagai perpanjangan tugas BNN di desa atau kelurahan berkomunikasi dengan penyalahguna narkoba menggunakan pendekatan komunikasi interpersonal.

Pendekatan menggunakan komunikasi interpersonal adalah proses interaksi antar individu untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Dalam hal ini, tujuan dari AP adalah merangkul Korban Penyalahgunaan narkoba untuk mau wajib lapor lewat program IBM.

BNNP Sumatera Barat Menjalinkan Kolaborasi dengan Stakeholders

BNNP Sumatera Barat menjalin kolaborasi dengan berbagai *stakeholders*, merupakan upaya proses bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan narkotika di Kota Padang dengan program IBM. Kolaborasi yang dibangun antar instansi perlu diperkuat kembali dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.

Sebagai instansi yang berkomitmen memberantas narkotika, BNNP Sumbar melakukan upaya kolaborasi dengan *stakeholders* lainnya seperti dengan kelurahan untuk melancarkan dipermudah akses untuk menjalankan program, dinas perikanan untuk menyediakan kolam ikan, budidaya ikan lele dan pakan ikan bagi penyalahguna narkotika, kolaborasi dengan perusahaan JAPFA, PT Bintang Toedjoe untuk pelatihan budidaya jahe merah, kolaborasi dengan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. HB Saanin untuk pemulihan penyalahguna narkotika, kolaborasi dengan tokoh masyarakat untuk memengaruhi penyalahguna untuk wajib lapor.

BNNP Sumbar menjalin kolaborasi dengan tokoh-tokoh yang punya jiwa sosial yang besar, mau ikut terjun membenahi masyarakat, dengan cara-cara yang humanis. Bukan dengan cara memberi label negatif kepada penyalahguna narkotika, di sini peran kolaborasi dalam membangun interaksi sosial dan mengembalikan fungsi sosial penyalahguna narkotika. Kekuatan kolaborasi pada awal sampai pertengahan program IBM, para informan mengatakan semangat untuk melaksanakan program IBM bisa berjalan dengan baik meskipun masih terbatas dengan anggaran. Sampai para staf mengeluarkan uang pribadinya untuk kebutuhan program di lapangan, membangun komunikasi dengan *stakeholders* yang bisa berkontribusi memberikan dukungan moril dan materil.

Kegiatan program yang terdapat di IBM merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat penyalahguna narkotika dan upaya meningkatkan *skill* penyalahguna untuk bisa bekerja dan menghasilkan uang. Setelah korban dilatih, diberi *skill* ditunjukkan arah dan tujuan di mana korban bisa bekerja tentu saja lewat *stakeholders* secara informal.

Pada tahap ini, BNNP Sumatera Barat telah mengupayakan kolaborasi dalam merehabilitasi pecandu secara humanis, membuat pecandu bukan menjadi orang asing. Tapi manusia yang bisa kembali ke jalan yang lurus, membuat perubahan-perubahan yang bisa dilakukan meskipun dari hal-hal kecil. Penelitian terdahulu terkait program IBM dalam keterlibatan masyarakat menunjukkan bahwa program IBM digunakan sebagai *community relations* organisasi dalam mencapai tujuan kinerja rehabilitasi (Amaliah & Hermansyah, 2022).

Hambatan Komunikasi yang Terjadi dalam Implementasi Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Kelurahan Rawang

Kesalahpahaman Komunikasi Eksternal kepada BNNP

Kesalahpahaman dalam komunikasi sudah lumrah terjadi di kehidupan masyarakat, apa pun yang dilakukan termasuk kegiatan yang baik pun belum tentu dianggap baik oleh orang yang melihat. Hambatan komunikasi yang terjadi adalah satu orang staf BNNP Sumatera Barat dengan satu Babinsa di sebuah *lapau*. Kesalahpahaman ini terjadi karena pertanyaan Babinsa yang tidak mengenakan bertanya kepada staf BNNP, ada kegiatan usaha kamu di sini? Menggunakan Bahasa Minang. Merasa dituding dengan adanya usaha yang menguntungkan mengakibatkan tersendatnya komunikasi, bukan malah mendukung program dari BNNP Sumatera Barat dalam program IBM secara khusus. Dengan saksama pelaksana program IBM menjelaskan, bahwa program ini bukan usaha tapi bekerja sama dengan lurah yang kesempatan itu juga hadir di *lapau*. Sehingga Pak Babin terdiam dan tidak mengucapkan kalimat apa pun. Upaya dan usaha dilakukan oleh pelaksana IBM, mendapatkan hambatan komunikasi dari aparat yang seharusnya bisa diajak kolaborasi mengimplementasikan program. Temuan peneliti adanya hambatan proses yang muncul akibat komunikator belum memiliki

kemampuan. Penerima pesan mengalami kesulitan dalam memahami pesan akibat rendahnya tingkat pendidikan, penguasaan bahasa dan intelektualitas. Dapat dipahami Babinsa belum memahami kerja BNNP Sumbar dalam menjalankan program karena tingkat pengetahuan Babinsa tidak memahami program.

Karena pelaksanaan yang terjadi bersentuhan langsung dari masyarakat, tentu saja intensitas BNNP khususnya di bidang rehabilitasi berinteraksi di *lapau-lapau*. Sementara itu di sisi lain kesalahpahaman komunikasi yang terjadi dari masyarakat dengan stigma penyalahguna adalah penjahat. Padahal program IBM hadir muncul dengan cara persuasif mengajak masyarakat untuk masyarakat pecandu bisa diterima kembali di kehidupan masyarakat itu sendiri.

“Mindset masyarakat adalah penyalahguna adalah pelaku kejahatan, persepsi ini yang masih ada di pikiran. Harapannya ayolah diajak untuk kembali ke jalan yang benar. Lain sisi dengan pengedar narkoba.” (Wawancara dengan informan D, 20 Mei 2023)

Kurangnya Dukungan Pemerintah Setempat dalam Program IBM

Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan keterangan pelaksanaan kegiatan IBM belum maksimal memerhatikan kegiatan kepedulian dalam merehabilitasi penyalahguna narkoba. Berikut juga dengan pemerintah Kota Padang yang masih belum memahami alur kerja program IBM yang perlu didukung lewat kelurahan untuk diimplementasikan. Bukan menganggap penyalahguna sebagai penjahat, tapi orang-orang yang perlu diselamatkan. Pemikiran ini yang perlu tumbuh dan hadir. Sehingga dukungan kebijakan belum diarahkan BNNP Sumatera Barat untuk melanjutkan program IBM di Rawang yang kini mati suri, bertepuk sebelah tangan. Apalagi sudah terjadi pergantian lurah. Uang atau materi tidak selalu menjadi faktor pendukung keberhasilan, tapi kebijakan yang tepat dapat menghasilkan kerjasama, kolaborasi dari berbagai unsur perangkat daerah yang bisa berkolaborasi dengan BNN dalam pemberdayaan masyarakat, meningkatkan *skill*, rehabilitasi mental dan percaya kepada penyalahguna narkoba bisa hidup normal. Sementara pemikiran yang ada di BNNP Sumatera Barat, pemerintah kurang mendukung berjalannya program IBM. Karena di BNN pun terkendala dengan anggaran yang ada.

Faktanya program ini sesuai dengan tujuan di awal hanya dianggarkan untuk 1 sampai 2 tahun paling lama diberikan oleh BNN, kemudian program IBM selanjutnya dikelola oleh kelurahan. Program IBM di kelurahan Rawang saat ini mati suri, karena kurangnya kepedulian lurah terhadap penyalahguna. Padahal penanggungjawab dari rehabilitasi penyalahguna narkoba adalah pimpinan daerah.

Seperti ada surat edaran Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri tentang P4GN kepada gubernur, walikota, bupati agar menganggarkan program P4GN sampai ke tingkat desa, tetapi fakta di lapangan regulasi itu tidak berjalan. Seolah-olah itu kerja BNN, Kendala yang terjadi di BNN terkendala soal anggaran. Hanya menyediakan anggaran untuk bimbingan teknis dan memberi contoh, jadi program IBM yang berjalan seperti mati suri. BNNP Sumatera Barat sudah memaksimalkan usaha untuk menjalankan program, tapi seperti bertepuk sebelah tangan programnya tidak diperhatikan oleh pemerintah kelurahan Rawang.

“Di IBM kami rapat koordinasi terlebih dahulu ke kelurahan, setelah ada program IBM kami undang Kesbangpol sebagai sekretaris selaku penanggungjawab P4GN adalah kepala daerah. Ketuanya adalah Gubernur, Wakil Ketua I adalah sekretaris daerah, Wakil Ketua II adalah BNNP.” (Wawancara dengan informan JM, Mei 2023)

Kolaborasi untuk program IBM perlu mendapatkan perhatian pemerintah, menimbang penanggungjawabnya adalah orang nomor satu di suatu wilayah provinsi. Harus ada keseriusan untuk menurunkan angka pengguna dan pecandu narkoba, mengingat masa depan generasi muda. Rekomendasi peneliti BNNP Sumatera Barat perlu mengadakan audiensi dengan gubernur, kemudian

membuat kebijakan yang bisa menekan penyalahguna narkoba di Sumatera Barat. Sebagai upaya keseriusan membangun nagari, menganggarkan kolaborasi dengan program CSR perusahaan-perusahaan yang ada Sumatera Barat untuk bergerak bersama melakukan pemberdayaan masyarakat mantan pecandu narkoba.

Berdasarkan penelitian terdahulu mengungkapkan evaluasi terhadap program IBM yakni merekomendasikan pengajuan sarana sesuai standar kelayakan. Kegiatan evaluasi produk meliputi kegiatan penetapan tujuan operasional program, kriteria-kriteria pengukuran yang telah dicapai, membandingkannya antara kenyataan lapangan rumusan tujuan, dan menyusun penafsiran secara rasional (Purnamasari & Nuryati, [2022](#)). Maka dari itu hal ini perlu dipahami oleh pengelola IBM di wilayah-wilayah.

Berbeda dengan keadaan yang di Rawang, peneliti memahami kurangnya dukungan pemerintah setempat, terutama di Rawang masih terdapat hambatan Hambatan psikososial. Merupakan hambatan yang timbul karena adanya perbedaan yang cukup lebar dan nilai-nilai yang dianut sehingga kecenderungan, kebutuhan serta harapan dari kedua belah pihak yang berkomunikasi juga berbeda yang dapat membuat citra komunikator menjadi turun karena adanya salah pengertian. Penyebabnya bisa jadi disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan, prasangka, stereotip, dan motivasi (Suryanto, [2015](#), p. 109).

Cara pemerintah atau kelurahan Rawang memandang penyalahguna narkoba sebagai penjahat, bukan berpikiran bagaimana memulihkan penyalahguna narkoba untuk bisa bangkit. Stigma demikian yang menjadi menghambat komunikasi dan psikososial terjadi.

PEMBAHASAN

Peran Perencanaan Komunikasi Dalam Program IBM

Perencanaan Komunikasi menjadi salah satu aspek pendukung yang bisa dilakukan untuk melaksanakan program-program, termasuk program IBM. Perencanaan komunikasi menjadi kekuatan untuk lebih melancarkan rencana program berjalan lebih baik. Berbagai model perencanaan komunikasi mulai dari yang sederhana sampai ke model yang rumit. Pelaksanaannya tergantung kepada sifat atau pekerjaan yang akan dilakukan.

Tidak ada model perencanaan komunikasi yang ideal, semuanya menyesuaikan dengan realitas yang ada. Melihat dari studi kasus dari implementasi program IBM, yang tepat digunakan dalam perencanaan komunikasi adalah model Philip Lesly yang menjadi sebuah rangkaian proses perencanaan komunikasi.

Model perencanaan yang dibuat oleh Philip Lesly terdiri atas dua komponen utama yakni organisasi yang menggerakkan kegiatan dan publik yang menjadi sasaran kegiatan. Sedangkan komponen terdapat dua tahapan yaitu organisasi (analisis dan riset, perumusan kebijakan, perencanaan program dan kegiatan komunikasi) dan publik (umpan balik, evaluasi) (Cangara, [2013](#)).

Sesuai dengan yang terjadi dalam program IBM, peran perencanaan komunikasi sebelum diluncurkan sampai ke kelurahan. Telah ada kebijakan dari BNN ke BNNP Sumatera Barat untuk mengimplementasikan program ke masyarakat. Yakni dari tahap pembuatan perencanaan nama program, membuat kebijakan sampai menyediakan anggaran khusus untuk kebijakan.

Perencanaan komunikasi dari BNN dalam menjalankan program IBM sampai kepada tahap pembuatan modul materi yang diberikan kepada staf BNNP Sumatera Barat dan masyarakat yang bersedia menjadi Agen Pemulihan. Tentu BNN sebagai organisasi besar melakukan riset terhadap permasalahan masih meningkatnya angka penyalahguna narkoba. Maka dibuat sebuah regulasi untuk mengatasi permasalahan peredaran narkoba. Perencanaan komunikasi menjelaskan

bagaimana cara menyebarkan pesan yang tepat dari komunikator kepada khalayak yang tepat, melalui saluran yang tepat, dan waktu yang tepat pula (Wijaya, 2015).

Perencanaan yang baik akan lebih mengarahkan perjalanan program dapat dijalankan sesuai rencana, tidak mengambil keputusan di tengah perjalanan tentang apa yang dilakukan. Program IBM berlangsung dalam perencanaannya untuk melakukan intervensi dari masyarakat kepada penyalahguna narkoba untuk bisa dibujuk atas kesadaran wajib lapor melakukan rehabilitasi. Proses komunikasi yang terjadi saat agen pemulihan (AP) mengkomunikasikan agar penyalahguna narkoba di Rawang untuk bisa ikut rehabilitasi dengan adanya perencanaan komunikasi interpersonal yang dibangun pada bimbingan teknis AP pada awal kegiatan IBM berjalan di Rawang.

AP merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam mencegah peredaran narkoba dan mengenali apakah ada orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba di wilayahnya. Seorang AP di Rawang memulai komunikasi dengan klien yang efektif agar klien tidak jenuh, kemudian dapat memahami maksud dan tujuan yang disampaikan. Komunikasi efektif telah diberikan kepada AP sebelum terjun ke lapangan, ini salah satu bentuk perencanaan dengan menyiapkan materi untuk bisa dipraktikkan di lapangan.

Komunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam aspek kehidupan seseorang, tidak lepas dari AP dalam masyarakat. AP merupakan orang atau masyarakat yang tinggal di kelurahan Rawang yang terpilih sebagai mitra kerja BNN/perpanjangan tangan untuk memantau dan mendampingi orang yang telah menyelesaikan rehabilitasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Noviarini et al., diketahui bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima, artinya terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara dukungan sosial dengan kualitas hidup pada pecandu narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi di panti rehabilitasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dengan adanya dukungan sosial yang tinggi pada pecandu yang sedang menjalani rehabilitasi maka kualitas hidup pecandu narkoba semakin tinggi (Noviarini et al., 2013).

Dalam penyampaian informasi AP mentransfer pesan dikemas secara efektif dengan tujuan pesan jelas kepada penerima pesan, penerima pesan mampu memahami maksud dan tujuan yang disampaikan AP. AP bisa memanfaatkan komunikasi sebagai memegang kendali perilaku klien dan memberikan motivasi untuk klien bisa bangkit dan terhindar dari narkoba.

Strategi Mengatasi Hambatan Komunikasi

Permasalahan komunikasi muncul dalam program IBM di Rawang, yakni pelaksana dituding oleh Babinsa melakukan usaha dan kegiatan yang dia tidak ketahui. Permasalahan klasik tentang seseorang yang merasa tidak diajak berkontribusi lebih lanjut. Kesalahpahaman dalam mengatasi komunikasi demikian dibutuhkan strategi komunikasi untuk mengatasi hambatan-hambatan komunikasi. Sampai program IBM yang diniatkan bisa dikelola oleh kelurahan pada tahap selanjutnya bekerja sama dengan tokoh masyarakat tidak direalisasikan sebagaimana mestinya.

Sampai saat ini program IBM mati suri karena tidak ada tindak lanjut dari masyarakat, sedangkan BNNP Sumatera Barat sudah berupaya berkali-kali. Informan mengatakan seperti bertepuk sebelah tangan. Hambatan komunikasi ini juga terhambat karena faktor anggaran yang kecil bagi pelaksana dan AP. Dukungan finansial kepada pelaksana program IBM dan AP menjadi hambatan komunikasi tidak berjalan dengan lancar, sehingga tidak muncul motivasi penggerak membangun kelurahan khusus menangani persoalan narkoba.

Strategi agar program IBM berjalan dengan lancar perlu didukung fasilitas anggaran yang memadai atau rutinitas bulanan bagi AP. Sehingga berkomunikasi dan motivasi untuk mencapai maksud dan tujuan bisa dilakukan sebaik mungkin.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas bersama teori yang digunakan pada penelitian ini, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa: BNNP Sumatera Barat sudah berusaha menjalankan program IBM dengan menggunakan komunikasi terbuka kepada pemerintah dan masyarakat dan Hambatan yang terdapat dalam komunikasi BNNP Sumatera Barat adalah hambatan proses dan hambatan psikososial yang berdampak kepada kurangnya dukungan pemerintah setempat (Kelurahan Rawang). Berdasarkan data penelitian yang peneliti dapatkan, maka saran dari penelitian ini adalah: BNNP perlu mengkaji ulang keberlanjutan program IBM, karena upaya dan keseriusan membangun program IBM ini telah melibatkan banyak ahli dan Perlu ada dukungan pemerintah di tingkat provinsi dan kota Padang yang mendukung kegiatan IBM bisa berjalan, tidak hanya di Rawang tapi di tempat lain yang berstatus bahaya lainnya.

REFERENSI

- Afrizal. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo Persada.
- Amaliah, A., & Hermansyah, H. (2022). Implementasi Community Relations Dalam Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Pasca Pandemi Covid-19. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(2), 253–264. <https://doi.org/10.33005/jdg.v12i2.3117>.
- BNN. (2021a). *Modul Pembelajaran IBM*. BNN.
- BNN. (2021b). *Intervensi Berbasis Masyarakat*. BNN.
- BNN. (2022). *Modul IBM*. BNN.
- Bovee, C. L., & Thill, J. V. (2007). *Komunikasi Bisnis. Edisi Kedelapan. Jilid 1*. Indeks.
- Cangara, H. (2013). *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Raja Grafindo Persada.
- Iskandar. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Gaung Persada. GP. Press.
- Kusmaryani, R. E. (2009). *Mengenal Bahaya Narkoba Bagi Remaja*. Unpad Press.
- Mulyana, D. (2008). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir. (1988). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Noviari, N.A., Dewi, M.P., & Prabowo, H. (2013). Hubungan Antara Dukungan Sosial dengan Kualitas Hidup pada Pecandu Narkoba yang Sedang Menjalani Rehabilitasi. *Jurnal Elektronik Gunadarma University*, 5. <https://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/pesat/article/view/957>.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods*. 3rd Edition. Thousand Oaks. Sage Publications. Inc.
- Purnamasari, N., & Nuryati, T. (2022). Evaluasi Implementasi Program Intervensi Berbasis Masyarakat di Wilayah Jakarta Utara. *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia*, 8(2), 66. <https://doi.org/10.31602/jmbkan.v8i2.7102>.
- RI, B. (2021). *Modul UNODC Standar Internasional Tentang Pencegahan Penggunaan Narkoba*. Badan Narkotika Nasional RI.
- Sari, E. (2006). *Modul Teori Organisasi Konsep dan Aplikasi*. Jayabaya University Press.
- Silalahi, U. (2004). Komunikasi Pemerintahan: Mengirim dan Menerima Informasi Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 36-54. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/JAP/article/view/652>.
- Suryanto. (2015). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Pustaka Setia.
- Wijaya, I. S. (2015). Perencanaan dan Strategi Komunikasi dalam Kegiatan Pembangunan. *Lentera*, 18(1), 53-61. <https://doi.org/10.21093/lj.v17i1.428>.